



BPH Migas Capai Kinerja Positif Selama Tahun 2018



8 >> **[sajian utama]**
Memastikan Pasokan BBM
Selama Natal dan Tahun
Baru 2019

24 >> **[sorot]**
Terus Perkuat Sinergitas
Pengawasan Distribusi BBM

26 >> **[beranda]**
Jargas Tingkatkan
Kesejahteraan Masyarakat

M. Fanshurullah Asa
Kepala BPH Migas

BBM Satu Harga

untuk Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia



Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Ady Mulyawan R.

Wakil Pimpinan Redaksi

Daman

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

I Ketut Gede Aryawan,
Idham Baridwan,
I Gusti Suarnaya Sidemen,
Bukhori Muslim, Anwar Rofiq,
Ayi Endan Harir, Muhammad
Rum Budi S., Dedy Wijaya

Editor

Narcicy Makalew, H Joko Kristadi,
Bagja Ramahtullah, Yosef G,
Dian Puspitasari

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Erna Sulastinah, Asas

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



Persiapan yang Baik Pastikan Pasokan BBM Aman Saat Libur Nataru

Selain periode mudik Idul Fitri, ada sejumlah momen lainnya yang memerlukan perhatian ekstra Pemerintah terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM), gas minyak cair (*liquefied petroleum gas*/LPG), dan listrik. Salah satunya adalah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam menghadapi libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi penanggung jawab posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral. Bersama stakeholder lainnya, BPH Migas menjadi penanggung jawab posko ini dengan membentuk tim satuan tugas (satgas) yang mulai bekerja sejak 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan dalam memenuhi ketersediaan energi selama libur Nataru, mulai dari koordinasi tiap minggu hingga turun langsung ke lapangan setiap hari untuk memastikan pasokan BBM, LPG, dan listrik.

Beberapa langkah persiapan konkret ini mencakup layanan khusus di titik yang belum ada fasilitas pelayanan BBM dan LPG, serta menyediakan BBM kemasan dan motor pengantar kemasan BBM. Volume BBM kemasan pun dinaikkan.

Selama masa libur Nataru, pasokan untuk BBM dan LPG tidak mengalami kelangkaan, hanya saja memang mengalami keterlambatan pengiriman. Satu hal yang menjadi catatan tersendiri, selama posko berlangsung banyak sekali kejadian dan bencana yang telah terjadi, seperti tsunami di Selat Sunda. Namun, kejadian tersebut tidak berdampak serius terhadap gangguan pasokan BBM. Hal ini menunjukkan persiapan yang baik akan berpotensi besar mencapai hasil atau kinerja yang baik pula.

Daftar Isi



06-07

[sajian utama]
BPH Migas
Capai Kinerja Positif
Selama Tahun 2018

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2018 lalu. Meski begitu, hal ini tak membuat BPH Migas terlena dan tetap akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

6 [sajian utama]
 BPH Migas Capai Kinerja Positif Selama Tahun 2018

8 Memastikan Pasokan BBM Selama Natal dan Tahun Baru 2019

12 Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Libur Natal dan Tahun Baru

14 BBM Satu Harga, Upaya Mewujudkan Keadilan Energi

18 [galeri foto Hilir Migas]

22 [berita foto]

24 [beranda]
 Terus Perkuat Sinergitas Pengawasan Distribusi BBM

26 Jargas Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

28 Kantor Cabang untuk Intensifkan Pengawasan

30 [ragam]
 Kerja Keras Penuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Bencana

32 [lensa]
 BPH Migas Goes to Campus Unsrii

Penyaluran BBM Satu Harga Lampau Target

BBM Satu Harga Hadir Maluku Tenggara Barat

Kunjungan Kepala BPH Migas ke Lokasi Terdampak Bencana Banten

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



24-25

[sorot]
**Terus Perkuat Sinergitas
 Pengawasan Distribusi BBM**

Sinergitas dengan berbagai *stakeholder* sangat diperlukan dalam rangka mengawasi **penyediaan dan distribusi BBM**. Oleh sebab itu, BPH Migas senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya dengan Kepolisian RI (Polri).



26-27

[beranda]
**Jargas Tingkatkan
 Kesejahteraan Masyarakat**

Ketegantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber energi harus **diminimalisir**. Salah satu caranya ialah menggantikannya dengan sumber energi lain, seperti gas bumi. Dalam konteks ini, Pemerintah telah menggulirkan program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau sering disingkat jargas.



08-11

[sajian utama]
**Memastikan Pasokan
 BBM Selama Natal dan
 Tahun Baru 2019**

Seiring dengan banyaknya aktivitas pada **masa libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019**, Pemerintah mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu upaya antisipatif tersebut adalah membentuk tim satuan tugas (satgas) dan posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Kepala BPH Migas
 Kunjungi TBBM Tanjung Gerem

Kepala BPH Migas Kunjungi SPBU Mini
 Milik Exxonmobil

Monitoring Penyediaan dan
 Pendistribusian BBM Hari Raya Natal 2018
 dan Tahun Baru 2019

FGD dengan Tema 'Prospek
 Pengembangan dan Peningkatan
 Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan'

Kunjungan Kepala BPH Migas ke TBBM
 Samarinda

Workshop "Sosialisasi Implementasi Sub
 Penyalur Dalam Rangka Percepatan
 Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional"
 di Kepulauan Seribu

Monitoring Pra Natal Batang-Semarang

Peresmian Program BBM Satu Harga ke-
 109

Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur
 Dalam Rangka Percepatan Penerapan
 BBM Satu Harga Secara Nasional di Cianjur

Sosialisasi "Pengawasan Bersama
 Penanganan Kegiatan Usaha
 Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi
 Melalui Pipa" di Surabaya

Pembahasan Mekanisme
 Kebutuhan JBT

BPH Migas Tak Jadi Dihapus

Pengawasan Penyediaan dan
 Pendistribusian BBM untuk Hari Raya
 Natal 2018 di Ngawi, Madiun dan
 Kertosono, Jawa Timur

Polri Dukung BPH Migas Awasi
 Penyaluran BBM

Sosialisasi Pengawasan Bersama
 Penanganan Kegiatan Usaha
 Pengangkutan dan Niaga Gas Melalui
 Pipa di Bandung

Mendapat Kunjungan Anggota DPR
 dan Pemda Bengkulu

Audiensi di Kalimantan Timur

Sinergitas Instansi dalam rangka
 Pengamanan Penyediaan dan
 Pendistribusian BBM di Bangka

Pembahasan Mekanisme Pengusulan
 Kebutuhan JBT untuk Konsumen
 Pengguna Transportasi Laut dan Kereta
 Api

Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Sinergi Mengoptimalkan
 Pemanfaatan Data Konsumsi
 Konsumen Pengguna BBM

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor
 43 Tahun 2018 di Bogor

Undang Stakeholder Jargas, BPH
 Migas Selenggarakan *Sharing
 Knowledge*

Arahan Menteri ESDM

Achievment Motivation Training
 Bersama Sekretaris Jenderal
 Kementerian ESDM

Tim Gabungan Tindak Tegas
 SPBU Nakal

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor
 43 Tahun 2018 di Magelang

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor
 43 Tahun 2018 di Malang

BPH Migas-Pemerintah Provinsi Riau
 Bersinergi dalam Pemanfaatan Data
 Konsumsi Konsumen Pengguna
 BBM

BPH Migas Capai Kinerja Positif Selama Tahun

2018

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2018 lalu. Meski begitu, hal ini tak membuat BPH Migas terlena dan tetap akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.



Tertibnya penyeteroran iuran oleh badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) maupun gas membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas pada 2018 melampaui target. Total PNBP BPH Migas tahun lalu mencapai Rp1,35 triliun atau 142,21% dari target Rp 950 miliar.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengatakan, capaian tersebut merupakan yang terbesar sejak 2006.

"Kami terus memperketat pengawasan kepada badan usaha untuk bisa membayar iuran. Jika tidak membayar, mereka mendapat sanksi. Sehingga badan usaha bisa lebih tertib," terangnya Selasa (1/1).

Berasal dari dua jenis pendapatan PNBP BPH Migas berasal dari dua jenis pendapatan. Salah satunya adalah pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM yang berkontribusi sebesar 70%. Sisanya, 30%, berasal dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Badan usaha yang menyalurkan BBM diwajibkan membayar *fee* atau iuran wajib kepada BPH Migas. Besaran iuran wajib kepada BPH Migas. Besaran iuran mencapai 0,3% dari setiap penjualan BBM nonsubsidi dengan volume sampai 25 juta kiloliter (kl) per tahun. Untuk volume penjualan 25 juta–50 juta kl per tahun, dikenakan iuran 0,2%. Untuk penjualan lebih dari 50 juta kl, dikenakan iuran 0,1%. Saat ini di Indonesia ada lebih dari 200 badan usaha penyalur BBM, seperti Pertamina, AKR, Total, maupun Shell.

Capaian positif BPH Migas lainnya adalah serapan anggaran yang mencapai 91,99% dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatatkan realisasi anggaran hampir 90% dan masih bergerak. Sebesar 54% atau Rp3,6 triliun anggaran Kementerian ESDM pada 2018 digunakan untuk belanja publik fisik program yang menyasar langsung rakyat kecil. Program-program tersebut, antara lain, penyediaan jaringan gas kota dan konversi minyak tanah ke elpiji. Ada pula penyediaan converter kit untuk nelayan kecil, penerangan jalan umum (PJU), lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) untuk masyarakat daerah pelosok, dan sumur bor di wilayah sulit air.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPH Migas atas capaian kinerja BPH Migas di tahun 2018,” kata Fanshurullah.

Peran signifikan

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengungkapkan, iuran yang dipungut tidak sebanding dengan anggaran kerja yang ditetapkan DPR RI untuk BPH Migas.

“Tahun lalu (anggaran BPH Migas) kira-kira Rp160 miliar, tapi sebenarnya itu sangat kecil dibanding PNPB yang kita dapat. Tahun 2018 PNPB itu Rp1,35 triliun, melebihi target. Tahun ini kurang lebih sama, karena kita kan tidak ada yang signifikan harus dibiayai. Anggaran rutin saja, pengawasan, belanja pegawai, dan



seterusnya,” kata Ibnu sata ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1).

Dalam DIPA APBN tahun 2019, anggaran BPH Migas masih dialokasikan kurang lebih sama dengan dengan tahun 2018, sebesar Rp 160 miliar. Pimpinan BPH Migas sedang menunggu terbitnya revisi Perpres tentang BPH Migas sebelum ajukan penambahan anggaran.

“Misalnya disetujui pertengahan tahun (perubahan Perpres), ya, bisa jadi kita ajukan di APBN-P, karena ada mekanisme APBN-P, kan. Tapi kita tunggu dulu aturannya,” katanya.

Usulan anggaran BPH Migas selama ini dilakukan melalui Kementerian ESDM yang kemudian dibahas dengan DPR untuk disetujui dalam APBN.

Ke depan, BPH Migas tetap akan berupaya maksimal untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ibnu, misalnya, mengharapkan peran yang sangat signifikan BPH Migas dalam mengatur persediaan dan distribusi BBM termasuk harga gas rumah tangga yang bisa mendorong tumbuh kembangnya industri ini di tanah air. Ibnu menambahkan, BPH Migas dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi distribusi BBM juga bekerja sama dengan instansi lain.

“Tidak hanya BPH, juga Kepolisian, BIN. Sudah mulai kita tandatangani MoU dengan Kepolisian sebagai pengawasan bersama dengan Bareskrim,” ujarnya. ★



Memastikan Pasokan BBM Selama Natal dan Tahun Baru 2019

Seiring dengan banyaknya aktivitas pada masa libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Pemerintah mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu upaya antisipatif tersebut adalah membentuk tim satuan tugas (satgas) dan posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah membentuk satgas tersebut bersama badan usaha terkait.



Tim satgas yang tergabung dalam program ini ada dua, yaitu unit Eselon I di Kementerian ESDM dan juga badan usaha di bidang penyediaan BBM, gas, dan listrik. Untuk tim pertama adalah Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Badan Geologi, Staf Khusus Menteri ESDM, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Dalam pelaksanaan, Tim Posko Nasional Sektor ESDM juga melibatkan dan bekerja sama dengan:

1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yaitu Korps Lalu Lintas Polri & Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri.

2. Kementerian Perhubungan, yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yaitu Ditjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
4. Badan Usaha Niaga Umum BBM, seperti PT Shell Indonesia, PT Vivo Energi Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia, dan PT Aneka Petroindo Raya

Satgas posko nasional sektor ESDM ditempatkan mulai Aceh hingga Papua. Mereka akan memantau ketersediaan BBM

sejak 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019. Setiap harinya, tim terbagi menjadi dua shift, yaitu shift I pukul 09.00–14.00 WIB dan shift II pukul 14.00–19.00 WIB.

Penambahan stok

Adapun tugas Tim Posko Nasional Sektor ESDM meliputi:

1. Melakukan pengumpulan/inventarisasi data lapangan mengenai:
 - a. Data fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik milik Badan Usaha.
 - b. Jalur transportasi penyediaan dan pendistribusian BBM.
 - c. Jalur penyediaan dan pendistribusian gas dan listrik.
 - d. Evaluasi dampak yang ditimbulkan jika terjadi kelangkaan pasokan BBM, gas dan listrik.
 - e. Potensi daerah rawan bencana alam.
2. Melakukan koordinasi dan pengawasan ke lapangan terhadap fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik dan daerah rawan bencana serta titik konsentrasi Natal, seperti di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan titik jalur wisata meliputi Kota Bukittinggi, Pangkal Pinang, Anyer, Puncak-Bogor, Lembang-Bandung, Jogjakarta, Malang,

Bali, dan Bunaken-Manado.

3. Melakukan evaluasi hasil koordinasi pengawasan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik dan kebencanaan geologi.
4. Melakukan penyusunan rekomendasi aksi tanggap darurat penanganan kelangkaan pasokan BBM, gas, listrik dan penanganan bencana alam.
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penambahan volume BBM akan difokuskan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada jalur yang biasa dilalui masyarakat untuk berlibur, pintu masuk, dan keluar jalan tol serta daerah tujuan wisata.

BPH Migas memastikan ketersediaan BBM, juga gas dan listrik, mencukupi untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru nanti. Sejumlah perusahaan di sektor terkait juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk libur akhir tahun ini.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, tim satgas juga telah melakukan rapat dalam rangka mengetahui ketersediaan dan perkiraan konsumsi BBM, gas dan listrik selama periode tersebut.

“Kita mengkaji yang diamankan UU bahwa ketersediaan BBM termasuk jenis BBM

umum. Karena itu, selain Pertamina, ada AKR, ada Shell, Total, Vivo juga BP yang baru launching 28 November lalu dan juga ada Exxon yang sudah bangun beberapa lokasi mini SPBU di beberapa lokasi. Ada juga PLN, ASDP serta mitra kementerian PUPR dan Perhubungan,” ujar dia di Kantor BPH Migas, Selasa (11/12/2018).

Dia menjelaskan, tim satgas juga telah menyiapkan fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik di daerah rawan bencana serta titik konsentrasi Natal, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Selain itu juga di daerah-daerah tujuan wisata seperti Kota Bukit Tinggi, Pangkal Pinang, Anyer, Puncak Bogor, Lembang Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, dan Manado.

Agar kebutuhan konsumen bisa terpenuhi selama musim Natal dan Tahun Baru, BPH Migas juga akan menambah titik penyaluran BBM. Adapun untuk jumlah kios Pertamina tahun ini bertambah menjadi 34 titik dari tahun lalu 15 lokasi di sepanjang tol.

Mobil dispenser juga bertambah jadi 16 lokasi dari sebelumnya sembilan di kawasan wisata. Kantong BBM untuk mobil tangki BBM juga ditambah menjadi 45 dari sebelumnya 39.





BPH Migas juga menambah volume BBM kemasan dari 2,5 kilo liter (KL) menjadi 3 KL. Motoris atau pengantar BBM yang menggunakan motor juga meningkat jumlahnya menjadi sembilan dari sebelumnya hanya tujuh.

Naik rata-rata 4%

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan, selama Natal dan libur Tahun Baru, konsumsi BBM harian secara nasional diperkirakan bakal naik rata-rata di angka 4%.

"Selama Natal dan libur Tahun Baru, konsumsi BBM harian secara nasional diperkirakan naik rata-rata 4%. Mengantisipasi hal tersebut, Pertamina akan meningkatkan stok dan penyaluran BBM Natal dan Tahun Baru dari rata-rata harian normal," jelas Adiatma di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Lanjut Adiatma, untuk konsumsi BBM jenis gasoline (Premium dan Pertamina Series) diperkirakan akan meningkat sekitar 5% dibandingkan kondisi normal, yakni dari

sekitar 94.000 Kilo Liter (KL) menjadi sekitar 99.000 KL. Di samping itu, konsumsi BBM jenis gasoil (Solar dan Dex series) meningkat sekitar 2% dibandingkan masa normal dari 40.000 KL menjadi sekitar 41.000 KL.

Volume Premium juga diprediksi naik menjadi 32.511 KL dari harian normal 31.267 KL. Peralite juga naik menjadi 53.864 KL dari 47.195 KL. Solar naik jadi 43.385 KL dari 42.380 KL. Elpiji naik jadi 31 ribu metrik ton (MT) dari 28 ribu MT, dan Avtur meningkat dari sebelumnya 16 ribu KL jadi 16,2 KL.

Untuk Stock LPG Pertamina akan menyiapkan tambahan alokasi LPG PSO (*Public Service Obligation/Subsidi*) & NPSO (*Non PSO/Non Subsidi*) mencapai sekitar 3% dari normal. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan LPG, Pertamina menyiagakan seluruh Region pemasaran *build up stock* di Agen dan Pangkalan, dengan memaksimalkan SPBU dan moderen *outlet* sebagai etalase dan penjualan LPG 3 kg dan 12 kg.

Sebelumnya, Pertamina juga menyatakan bahwa tengah mempersiapkan Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru untuk menghadapi libur Natal 2018 dan Tahun

Baru 2019, yang bertugas mengawal ketersediaan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah Indonesia serta melayani kebutuhan BBM dan LPG bagi masyarakat khususnya masyarakat yang akan merayakan Hari Natal serta libur akhir tahun.

Tanggal-tanggal puncak

Untuk menangani masalah cuaca pada Hari Natal dan Tahun Baru, BPH Migas menyiapkan peta kawasan. Dengan begitu bisa mengetahui cuaca buruk, yang akan menyebabkan bencana, seperti longsor. Dengan begitu penyaluran BBM tidak terhambat.

Fanshurullah Asa juga akan mengundang Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta jajarannya untuk mengecek kesiapan penambahan titik penyaluran BBM.

"BPH Migas siap undang untuk monitoring Menteri, Wakil Menteri, Eselon 1 dan 2 turun lapangan mengecek kesiapan kami tidak mau hanya di atas kertas," kata dia.

Tim Posko Nasional Sektor Energi Sumber Daya Mineral juga telah memetakan





tanggal-tanggal puncak konsumsi BBM, LPG serta listrik. Puncak konsumsi BBM menjelang diperkirakan 31 Desember hingga 2 Januari 2019. Konsumsi bensin puncaknya 5 Januari 2019, sedangkan avtur dan LPG pada 22 Desember 2018.

“Potensi puncak konsumsi BBM untuk Nataru (Natal dan Tahun Baru) ini ada tiga kali ya, pada 22 Desember, tanggal 31 Desember, dan 5 Januari,” jelasnya.

Selain itu, puncak konsumsi avtur dan elpiji diprediksi pada 22 Desember 2018.

“Jadi sebelum Natal dan Tahun Baru itu kan arus balik, jadi 3 ini yang akan diantisipasi betul-betul ketersediaan BBM-nya, akan kita kawal jangan sampai terjadi kelangkaan, antrian panjang dan sebagainya,” terang Fanshurullah.

“Kami yakin dan optimis pelaksanaan satgas untuk Natal dan Tahun Baru mulai 18 Desember 2018 sampai 8 Januari 2019 akan berjalan dengan aman, baik, dan terencana,” ungkapnya.

Dengan adanya Posko Nasional Sektor ESDM diharapkan ketersediaan dan

kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah NKRI untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang akan merayakan Hari Natal serta mengisi libur akhir tahun. Selain itu juga apabila terjadi kelangkaan dan gangguan penyediaan dan pendistribusi BBM, Gas, Listrik dan bencana geologi (letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah) dapat direspon dan diatasi dengan cepat sehingga masyarakat dapat merayakan Natal 2018 dan mengisi libur akhir tahun dengan aman dan penuh suka cita.

Selain itu, nomor kontak pengaduan masyarakat yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. Posko BPH Migas (021-5276709).
2. Call Center PT. Pertamina (Persero) di (1-500-000).
3. Call Center PT. AKR Corporindo, Tbk di (021-531110).
4. Call Center PT. PLN ((kode area) 123).
5. Call Center PT. PGN di (1-500-645).
6. Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (022-7272606). ★



Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Libur Natal dan Tahun Baru



“Kondisi ketersediaan (stok) BBM selama masa Posko Nasional adalah normal. Tidak terjadi kelangkaan BBM selama masa posko,” kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melalui keterangan resminya, Selasa (8/1).

Selama Natal dan tahun baru, Kementerian ESDM menggelar Posko Nasional ESDM Nataru 2018/2019 yang berlangsung selama 22 hari. Terhitung mulai dari 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.

Bukan langka, tapi keterlambatan pengiriman

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium selama periode Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 mengalami kenaikan tipis sebesar 3,6% dibandingkan kondisi normal.

“Pasokan BBM dan elpiji lancar. Kalaupun ada masalah bukan langka, tapi terjadi keterlambatan pengiriman

khususnya Premium. Kebanyakan keluhan masyarakat adalah terlambatnya pengiriman Premium ke SPBU. Tapi, Premium ada tiap hari,” kata Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad.

la merinci, selama Posko Nasional ESDM Hari Raya Natal 2018 dan Tahun 2019 yang berlangsung selama 22 hari, penyaluran Peralite turun 1,5%, Pertamina turun 2,7%, dan Pertamina Turbo turun 7,7% dibandingkan pemakaian harian normal. Sementara itu, Solar turun 16%, Dexlite turun 53,2%, Pertamina Dex meningkat 4,7%, minyak tanah turun 27,5%, dan Avtur turun 4,4% dibanding DOT.

“Terdapat empat bandar udara dengan peningkatan pendistribusian Avtur tertinggi, yaitu Soekarno-Hatta, Banten; Ngurah Rai, Bali; Kualanamu, Medan; dan Sultan Hasanuddin, Makassar,” imbuhnya.

Henry menuturkan realisasi tertinggi penyaluran BBM jenis Premium terjadi pada 18 Desember 2018 sebesar 40.378 kiloliter (kl); Peralite 22 Desember 2018 sebesar 56.867 kl;

Pertamax pada 25 Desember 2018 sebesar 17.083 kl; dan Pertamina Turbo pada 18 Desember 2018 sebesar 881 kl.

Sementara, penyaluran tertinggi Solar sebanyak 94.362 kl pada 20 Desember 2018; Pertamina Dex 1.586 kl pada 28 Desember 2018; Dexlite 1.613 kl pada 18 Desember 2018; minyak tanah 2.287 kl pada 20 Desember 2018; dan Avtur 17.104 kl pada 22 Desember 2018.

"Kondisi ketersediaan (stok) BBM selama masa Posko Nasional ESDM normal dan tidak terjadi kelangkaan BBM selama masa posko," tutur Henry.

Kuota 2019

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengatakan, volume kuota BBM jenis Premium pada 2019 adalah sebesar 11,8 kl. Jumlah ini tidak berubah bila dibandingkan 2018.

"Kami sudah sidangkan di akhir tahun tapi mungkin tinggal penugasannya secara resmi yang belum," kata Ibnu.

Ibnu melanjutkan, penetapan kuota premium tidak mengalami perubahan. Alasannya, tahun lalu serapannya tidak mencapai 100%, meski Pemerintah sudah merevisi aturan yang membuat premium kembali dijual di Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

"Kita menetapkan Jamali sebagai wilayah penugasan (lagi) kan sekitar pertengahan tahun. Jadi realisasi itu kan harusnya satu tahun penuh. Makanya kitaantisipasi safety faktor sekitar 5%," jelasnya.

la menambahkan, penetapan badan usaha yang akan menyalurkan premium sifatnya adalah penugasan yaitu selama lima tahun. Tetapi, untuk volume kuota ditetapkan per tahun dimana badan usaha akan ikut lelang terlebih dahulu.

"Itu (penetapan volume) sifatnya penugasan lima tahun, tapi tiap tahun kita bisa. Karena mekanisme lelangnya ke badan usaha akhirnya yang ikut itu-itu aja lelangnya. Jadi untuk mempermudah saja," ungkapnya.

Untuk Solar, BPH Migas menetapkan kuota tahun ini sebanyak 14,5 kl. Angka ini berkurang dari kuota tahun lalu yang sebanyak 15,5 juta kl. Ibnu mengatakan, dalam pendistribusian BBM bersubsidi ini sebanyak 500.000 kl akan ditahan sampai benar-benar dibutuhkan. Hal ini untuk menekan agar konsumsi tidak berlebihan.

"Ada saving-nya 500.000 kl untuk menjaga jangan sampai ada bukan kelangkaan, pemborosan," tuturnya.

Skema ini juga diterapkan pada distribusi solar tahun lalu, di mana dari kuota 15,5 juta kl sebanyak 1 juta kl ditahan. Kuota yang ditahan tersebut akhirnya hanya terpakai sebanyak 15,3 juta kl.

"Jadi masih ada kelebihan sekitar 200.000 sampai 300.000 kl," kata dia. Dengan demikian, selama 2018 pemerintah dapat menekan subsidi solar dengan baik.

Dia mengungkapkan, alasan diturunkannya jumlah kuota solar subsidi tahun ini karena pengguna kendaraan sudah menggunakan mesin baru. Mesin-mesin tersebut sudah lebih canggih dan ramah lingkungan sehingga tidak cocok jika menggunakan BBM jenis ini.

"Kalau di kota sudah jarang tuh yang pakai solar subsidi. Lebih cocok ke gasoil 50 ke atas sedangkan solar subsidi itu gasoil 48. Sama seperti RON 88 dan RON 92," ucapnya.

Penetapan kuota BBM subsidi menggunakan asumsi realisasi tahun sebelumnya. Kemudian, pihaknya juga melihat pertumbuhan ekonomi dan asumsi lainnya yang terkait.

"Itu sudah ada mekanismenya, kalau tiap tahun ekonomi tumbuh berarti kebutuhan solar juga akan naik," tuturnya. Ibnu menambahkan, kuota Solar dipangkas agar penyalurannya tidak disalahgunakan. Apalagi, sudah ada beberapa kasus mengenai penyelewengan BBM Solar subsidi. Jadi, dengan kuota lebih sedikit harapannya bisa lebih tepat sasaran. "Ini kan masalah subsidi. Subsidi kan harus kita awasi betul-betul ya karena ada uang negara," ujarnya. ★



BBM Satu Harga, Upaya Mewujudkan Keadilan Energi

Pemerintah RI telah menjalankan sejumlah terobosan untuk menciptakan keadilan pada masyarakat di wilayah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T). Salah satunya adalah program BBM Satu Harga. Melalui program ini, masyarakat di wilayah 3T bisa menikmati BBM dengan harga yang sama di wilayah perkotaan, khususnya Pulau Jawa. Ini artinya wujud nyata bentuk keadilan energi.

Penegasan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-73 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018). Dengan adanya Program BBM Satu Harga, menurut Presiden, masyarakat yang berada di pegunungan Papua, pulau-pulau terdepan maupun di kawasan perbatasan, dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Jawa.

“Saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa,” ujar Presiden.

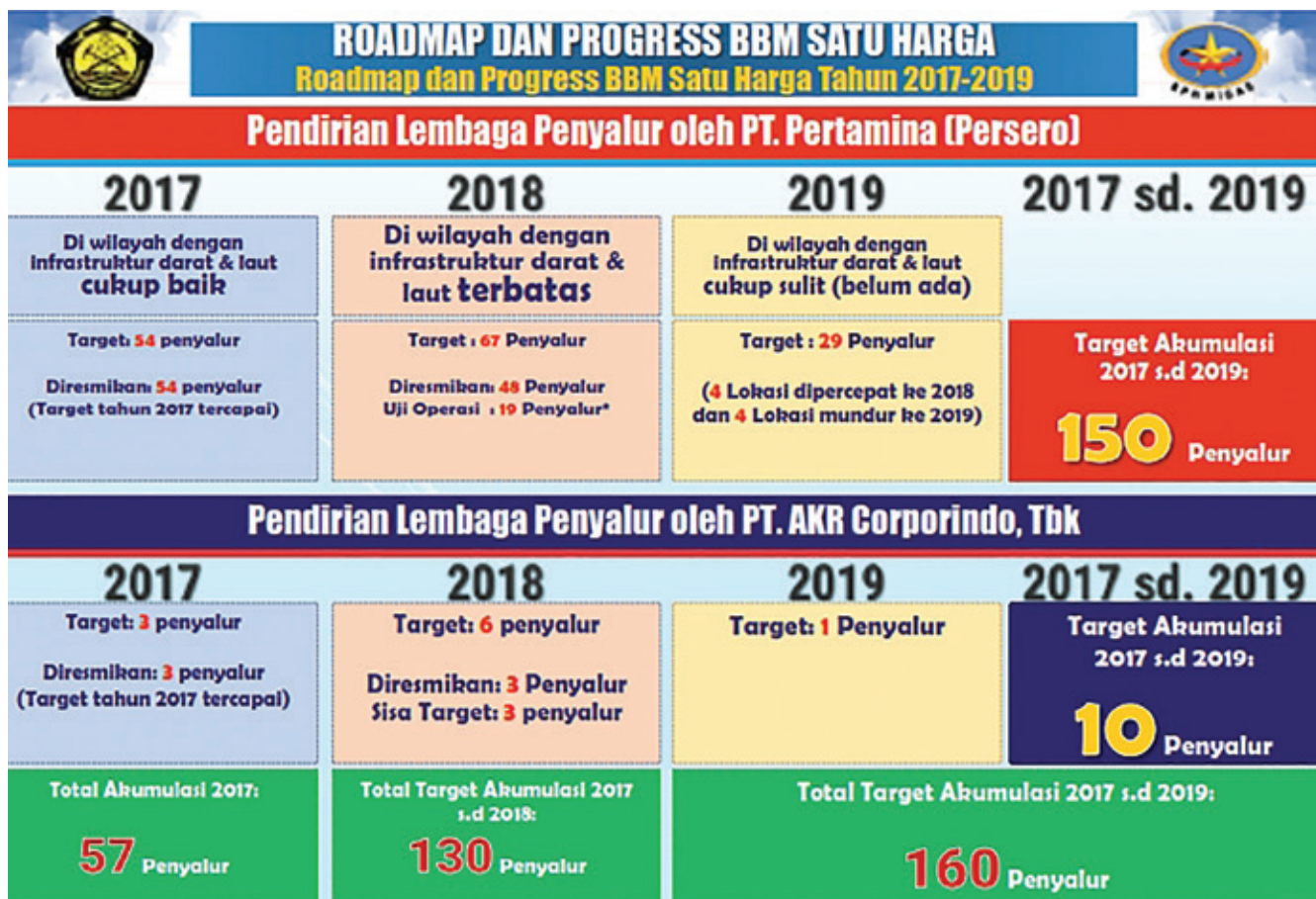
Presiden melanjutkan, Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Insya Allah, kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita,

menjadi ibadah seluruh rakyat negeri Pancasila, menjadi prestasi bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Prioritas untuk kebutuhan dalam negeri

Dalam menjalankan Program BBM Satu Harga, Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai payung hukumnya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan





Secara Nasional. Selain Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016, Pemerintah juga menetapkan sejumlah regulasi lain terkait pemanfaatan BBM di tanah air, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Peraturan ini guna mengoptimalkan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan kata lain, Pemerintah mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dalam Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

"PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi," demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.

Selanjutnya pada Pasal 3, dalam rangka pemenuhan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontraktor atau Afiliasinya wajib menawarkan minyak bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

Kewajiban penawaran tersebut, dilaksanakan paling lambat tiga bulan

sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian Kontraktor. Kemudian berdasarkan penawaran ini, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan Kontraktor atau Afiliasinya wajib melakukan negosiasi pembelian minyak bumi bagian Kontraktor secara kelaziman bisnis.

Terhadap hasil negosiasi tersebut, PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian minyak bumi bagian Kontraktor. Atas penunjukan langsung ini, PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang selama 12 bulan.

"Setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal (Migas)," bunyi Pasal 6.

Pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan

Menteri ini, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas sesuai dengan kewenangannya.

Menyentuh 98 titik

Program BBM Satu Harga telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Sebanyak 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga akan didirikan hingga 2019. Pada akhir tahun 2018 ditargetkan akan berdiri 130 lembaga penyalur. Sebelumnya di 2017, telah dibangun 57 penyalur, sehingga pada tahun 2018 ini ditargetkan 73 lembaga penyalur akan beroperasi.

Untuk mempercepat penerapannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017.

Dalam suatu kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan capaian tiga target utama di sektor ESDM selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti yang disampaikan Jonan, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa pemanfaatan itu harus berkeadilan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus membuat pemanfaatan energi itu berkeadilan. Salah satu atau mungkin yang paling utama dari pemanfaatan energi berkeadilan adalah ketersediaan, di samping

keterjangkauan harga," ujar Jonan pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Target pertama adalah Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Pemerintah berupaya membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 160 titik hingga tahun 2019.

"Upaya Pemerintah untuk membangun SPBU, baik SPBU yang seperti kita lihat atau SPBU mini itu di banyak titik yang dulunya tidak ada. Ini satu titik mewakili kira-kira satu kecamatan, kurang lebih. Targetnya sampai akhir 2019 adalah 160 titik. Itu berarti 160 kecamatan yang sebelumnya tidak ada penyaluran BBM secara resmi," jelasnya.

Hingga akhir Oktober tahun ini, total 98 titik SPBU BBM 1 Harga sudah beroperasi, 57 titik di tahun 2017, dan 41 titik pada tahun ini.

"Tahun ini targetnya akan dibangun lagi 73 titik, sampai hari ini sudah selesai 41 titik, jadi total 98 titik. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi 130 titik. Ini pembangunannya jalan terus, bukan satu selesai dibangun, kemudian dibangun yang lain. Bersamaan saja," terang Jonan. Selanjutnya, program ini akan berlanjut dengan pembangunan sub penyalur yang beroperasi hingga di desa.

"Selanjutnya kita akan pelan-pelan membuat sub penyalur yang masuk ke setiap desa. Kita akan coba setelah ini, supaya orang tidak membeli BBM itu naik motor 10–15 kilometer (km). Kalau 5 km masih boleh. Kalau sampai naik motornya 15 km, akan kita perpendek," ujar Jonan.

Pada kesempatan tersebut, Jonan juga meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perizinan daerah untuk operasional SPBU BBM Satu Harga.

"Saya mohon juga kepada Pak Mendagri, mohon diimbau kepada Kepala Daerah itu perizinannya supaya mendukung, karena perlu perizinan bupati, terutama izin operasional," tutur Jonan.

Berhasil dilaksanakan 100%

Dalam melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang

ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BPH Migas harus mengawal penerapan program BBM Satu Harga di seluruh NKRI, khususnya pada daerah 3T sesuai arahan Presiden RI yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016.

BBM Satu Harga merupakan kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Premium sebesar Rp6.450 per liter dan Solar Rp5.150 per liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Kebijakan ini mengikuti pencabutan subsidi BBM jenis premium dan pemberian penugasan kepada Pertamina dan badan usaha swasta untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan SPBU di tempat tersebut dan mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara.

Menteri ESDM Ignasius Jonan merasa bangga karena Program BBM Satu Harga merupakan satu-satunya program strategis Nasional yang berhasil dilaksanakan 100%. Ia mengimbau agar BPH Migas untuk tetap fokus dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan BBM Satu Harga. Selain sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapan Program BBM Satu Harga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi meski masih dirasakan dalam lingkup terbatas. Pasalnya, titik-titik penerapan program ini menasar daerah 3T yang harga BBM sebelumnya di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya, seperti di Pulau Jawa.

Dengan adanya program BBM Satu Harga, masyarakat dapat memperoleh harga BBM yang terjangkau sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki taraf hidup perekonomiannya. Karena itu, salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penerapan Program BBM Satu Harga adalah Papua. Karena harga BBM di wilayah Papua kerap jadi sorotan lantaran lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku di Pulau Jawa dan wilayah lainnya yang bisa mencapai Rp40.000,- hingga Rp100.000,-/ liter.

Banyak harapan masyarakat di daerah terpencil ditumpukan kepada BPH Migas dalam penyaluran BBM Satu harga ini.

Seperti diutarakan warga Nabire, Papua melalui Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Nabire, Aif Syarifudin yang berharap penerapan BBM Satu Harga bisa berlangsung dengan lancar dan aman. Nabire, kata Aif, butuh percepatan penerapan BBM Satu Harga mengingat letak geografis daerah ini strategis, diapit beberapa kabupaten baik dari pegunungan, terdiri dari empat sampai lima kabupaten juga di pesisir.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Cendrawasih Ferdinand Risamasu menyatakan, Program BBM Satu Harga berdampak positif bagi perekonomian wilayah di Papua dan Papua Barat. Dampak terasa pada sektor logistik dan membantu kelancaran transportasi warga. Ia menyatakan program tersebut berdampak baik pada usaha dan bisnis transportasi,



terlebih, yang berada di wilayah pegunungan.

Manfaat program ini juga dirasakan petani bawang di Desa Raekore, Sabu Barat, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya, Octovianus Alexander Rajariwu. Ia menuturkan, sebelum ada program BBM Satu Harga, para petani bawang di desanya, harus berpikir dua kali untuk membajak sawah. Selain harga BBM mahal, untuk mendapatkannya penuh perjuangan dengan jarak tempuh hingga 6 km. "Harga bensin kisaran Rp100.000 sampai Rp200.000 per liter. Kami dijatah 1,5 liter seukuran botol air mineral," katanya.

Bahan bakar tersebut, sambungnya, tidak cukup untuk menggerakkan mesin traktor secara maksimal. Alex dan petani lainnya pun terpaksa patungan membeli BBM

berharga mahal ke pengecer agar sedikit bisa membantu menggerakkan traktor. "Tapi sejak akhir Agustus lalu, BBM Satu Harga sudah masuk di wilayah kami. Harga bensin sudah sama dengan di Jawa, Rp6.450 per liter. Jadi, saya bisa gunakan traktor semaksimal mungkin. Pasokannya BBM-nya juga lancar," jelasnya.

Tak hanya panen yang meningkat, kemudahan mendapatkan bahan bakar melalui program tersebut, membuat masyarakat mendapatkan harapan baru untuk menggarap sawah dan ladangnya. Kehadiran titik penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T ini telah terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Karena, dengan pengeluaran transportasi makin menurun, produksi mereka bisa makin meningkat sehingga denyut nadi ekonomi warga bergerak cepat.

Di sela-sela peresmian lembaga penyalur SPBU Kompak di Kampung Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (1/11/2018), Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, Program BBM Satu Harga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan energi berkeadilan bagi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Dia menambahkan, pihaknya berharap program ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. "Masyarakat dan Pemerintah harus bersinergi untuk ikut mengawasi penyaluran BBM Satu Harga tersebut mengingat BBM ini tidak diperuntukkan untuk aktivitas usaha, melainkan langsung untuk masyarakat," tegasnya. ★





galeri foto **Hilir Migas**



Kunjungan ke SPBU 3442213 Sukanegara, Pandeglang, Banten, SPBU Terdampak Tsunami sudah beroperasi normal 24 Jam.



Kunjungan ke PLN Rayon Anyer dalam rangka Monitoring penyediaan dan Distribusi BBM menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, 24 Desember 2018.



★ Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan melakukan pengawasan lapangan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM sehari sebelum hari raya Natal 2018 di Surabaya, Jawa Timur.



galeri foto **Hilir Migas**



Peresmian Program BBM 1 Harga ke-107 SPBU Kompak Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara dan peresmian ke-108 SPBU Kompak Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan.



★ Komite BPH Migas (Ir. Hari Pratoyo, MM) bersama dengan Badan Geologi dan EBTKE menghadiri acara Penyerahan-Sosialisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Sumur Bor di Ngawi, Jawa Timur, 10 Januari 2018.



★ Monitoring Tim Pasca Jayapura di TBBM Jl. Sei Musi No. 2 Dok 8 Bawah, Kota Jayapura, 27 Desember 2018





Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga secara Nasional di Banyuasin

Komite BPH Migas Ahmad Rizal menjadi salah satu narasumber dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga secara Nasional di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (12/12/2018). Kegiatan ini dihadiri oleh Pemda, perwakilan masyarakat, dan Stakeholder terkait yang dilanjutkan dengan agenda *coaching clinic* untuk *Stakeholder* dan masyarakat terkait implementasi Sub Penyalur.



Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa di Jambi

BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa di Hotel BW Luxury Jambi, Jumat (7/12/2018). *Workshop* ini dalam rangka tindak lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.





Survey Daya Beli Masyarakat Calon Pelanggan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kabupaten Serang

BPH Migas melakukan survey daya beli masyarakat kepada calon pelanggan jaringan gas rumah tangga yang infrastrukturnya dibangun oleh Pemerintah di Kabupaten Serang. Survey juga dilakukan pada pangkalan dan pengecer LPG. Survey ini merupakan tahapan yg dilakukan BPH Migas sebelum dilakukan penetapan Harga Gas Melalui Pipa Untuk Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Hasil survey akan menjadi salah satu pertimbangan BPH Migas dalam penetapan harga gas bumi RT&PK selain keekonomian yang wajar dari Badan Usaha operator Jargas agar dapat mengembangkan jaringan jargas.



Program BBM Satu Harga, Bukti Besarnya Perhatian Pemerintah Kepada Rakyat Teweh Timur, Kalimantan Tengah

Hadirkan Keadilan Ketersediaan, Pendistribusian, dan Harga BBM Bagi Masyarakat Teweh Timur Melalui Program BBM Satu Harga, Bukti Besarnya Perhatian Pemerintah Kepada Rakyatnya. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara nasional, Hari ini (Jumat, 23/11) Komite BPH Migas, Henry Ahmad meresmikan Penyalur BBM Satu Harga ke-99 di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.



Terus Perkuat Sinergitas Pengawasan Distribusi BBM

Sinergitas dengan berbagai *stakeholder* sangat diperlukan dalam rangka mengawasi penyediaan dan distribusi BBM. Oleh sebab itu, BPH Migas senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya dengan Kepolisian RI (Polri).

Bentuk sinergitas tersebut bermacam-macam bentuknya. Mulai dari sosialisasi, workshop hingga penandatanganan kesepakatan bersama. Pemahaman bersama mengenai aturan UU Migas, misalnya, menjadi hal yang penting mengingat beberapa pendindakan terkait penyediaan dan distribusi BBM masih kerap mendapat kendala di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, pihak

BPH Migas masih kerap menemukan adanya perbedaan pemahaman antara personil kepolisian di lapangan soal izin pengangkutannya.

Maka, sinergitas antara kedua institusi ini menjadi krusial mengingat pengawasan menjadi hal yang penting untuk memastikan hak masyarakat dalam mengakses BBM tetap terjaga. Terlebih, persoalan BBM menjadi salah satu bagian

penting dalam menunjang pembangunan nasional.

- Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Kapolri Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman antara BPH Migas dan Kepolisian RI di Jakarta, Senin (17/9).





- Penandatanganan Nota Kesepahaman ini demi mewujudkan sinergitas dalam pengamanan dan penegakan hukum terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini juga termasuk kepada ranah percepatan pemberlakuan BBM Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara nasional.
- Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio membuka acara "Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa", Kamis (13/12/2018), bertempat di Hotel Wyndham Surabaya, Jawa Timur.
- Komite BPH Migas Jugi Prajogio membuka Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa di Hotel El Royale Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/12/2018). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang dipilih untuk pelaksanaan sosialisasi karena terdapat kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Gas Bumi melalui pipa serta jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat (7/12/2018). Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Henry Ahmad dengan narasumber dari unsur Kementerian ESDM, Polri, pemda, dan Badan Usaha.
- Dalam rangka sinergisitas, optimalisasi dan implementasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, BPH Migas mengadakan workshop bertajuk "Sinergisitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional". Kegiatan ini digelar di Vega Hotel, Sorong, Papua Barat, Kamis (6/12/18). Anggota Komite BPH Migas Sumihar Pandjaitan menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut.
- Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal menjadi salah satu narasumber dalam workshop bertajuk "Terwujud sinergitas dalam rangka pengamanan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Gas Bumi melalui pipa untuk menunjang pembangunan nasional". Acara ini berlangsung Hotel Arya Duta, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (30/11/18).
- Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar membuka workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengamanan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Novotel, Bangka, Kamis, (29/11/2018).
- Komite BPH Migas M. Lobo Balia membuka workshop "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" yang bertempat di Hotel Grand Mercure, Medan, Sumatera Utara, Kamis (29/11/2018).
- Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar membuka workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Kamis (22/11/2018).
- Komite BPH Migas Hari Pratoyo membuka workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Aston, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (14/11/2018).
- Komite BPH Migas M. Lobo Balia dan M. Ibnu Fajar menghadiri workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Gran Senyuir Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (14/11/2018).
- Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan menghadiri workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Vega, Sorong, Papua Barat, Kamis (6/12/2018).
- Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar membuka workshop dan sosialisasi dengan tema "Sinergitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Bersama dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional" di Hotel Aston Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (6/12/18). ★



Jargas Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ketergantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber energi harus diminimalisir. Salah satu caranya ialah menggantikannya dengan sumber energi lain, seperti gas bumi. Dalam konteks ini, Pemerintah telah menggulirkan program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau sering disingkat jargas.

Kebutuhan gas rumah tangga dari gas bumi dipasok melalui jaringan pipa gas ke rumah-rumah penduduk. Lewat sistem ini, perusahaan penyedia gas menyediakan jaringan saluran pipa gas sesuai standar keamanan tanpa perlu menyediakan unit pengilangan. Di sisi lain, konsumen tinggal membayar biaya penggunaan gas sesuai konsumsi yang dipakai tanpa perlu membeli tabung, seperti berlangganan air bersih atau listrik. Dengan jaringan yang sistematis dan terstruktur juga akan meningkatkan efisiensi distribusi.

Dari sisi biaya, harga gas yang dijual juga relatif lebih murah dibandingkan harga jual gas tabung.

Dengan harga jual yang lebih murah, jargas untuk rumah tangga bisa mengurangi biaya operasional rumah tangga sekitar hingga puluhan ribu per bulan per keluarga. Selain itu, jaringan gas kota juga lebih praktis, bersih, aman, dan tidak perlu repot isi ulang dibandingkan tabung LPG 3 kilogram.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, akumulasi jaringan gas bumi rumah pada 2014 hanya 200 ribu sambungan rumah tangga (SR). Selang setahun, jumlahnya naik menjadi 220.363 SR. Kemudian, pada 2016 melonjak menjadi 319.514 SR. Pada 2017, akumulasi jargas telah mencapai 373.190 ribu SR. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan

jargas mencapai 463.646 SR. Pada tahun berjalan 2018 ini, melalui dana APBN, pemerintah telah membangun 89.906 SR dan PGN 550 SR.

Untuk jangka panjang, target pembangunan Jargas sebesar 4,7 juta SR pada 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan total rumah tangga di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 65 juta rumah tangga di Indonesia. Karenanya, pemerintah akan melakukan akselerasi pembangunan jaringan gas kota dengan pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Terkait jargas, BPH Migas berperan dalam melakukan survei sebelum menetapkan harga gas melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Selain keekonomian yang wajar, BPH Migas juga harus mempertimbangkan keuntungan Badan Usaha sebagai operator jargas agar

mereka dapat mengembangkan jaringan jargas.

- BPH Migas melakukan survei daya beli masyarakat kepada calon pelanggan jaringan gas rumah tangga yang infrastrukturnya dibangun oleh Pemerintah di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (29/11/2018). Survei juga dilakukan pada pangkalan dan pengecer LPG.
- BPH Migas menyelenggarakan Sharing Knowledge terkait Potensi Pengembangan Market untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dalam rangka Mewujudkan Nilai Keekonomian

Wajar dalam Pengelolaan Jaringan Gas yang Berkelanjutan di Royal Hotel Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/11/2018). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPH Migas dalam penetapan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Kegiatan ini dihadiri oleh Komite BPH Migas Judi Prajodio dan Hari Pratoyo. ★





Kantor Cabang untuk Intensifkan Pengawasan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan membuka kantor cabang di daerah untuk mengintensifkan pengawasan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi. Untuk itu, BPH Migas membutuhkan anggaran lebih untuk mewujudkan rencana tersebut.

Kepentingan nasional

Menurut Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar, anggaran lembaganya hanya Rp160 miliar pada tahun 2018. Padahal, katanya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil dikumpulkan oleh BPH Migas mencapai Rp1,35 triliun pada 2018. Karena itulah untuk merealisasikan pembukaan kantor cabang di daerah, BPH butuh anggaran lebih dari yang ditetapkan APBN.

"Karena ini untuk kepentingan nasional, memang sekarang ini sedang digalakkan pengawasan bukan hanya oleh BPH. Tapi Kepolisian, dari instansi lain seperti BIN (Badan Intelijen Negara), dan seterusnya," kata Ibnu di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (8/1).

Dalam DIPA APBN 2019, anggaran BPH Migas masih dianggarkan kurang lebih sama dengan dengan tahun 2018 sebesar Rp160 miliar. Pembukaan kantor cabang di daerah ini rencananya bisa terwujud tahun ini. Namun hal itu masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas.

Untuk bisa membangun cabang baru dan memperketat pengawasan di daerah, Ibnu mengaku tahun ini BPH Migas akan minta aturan pengawasan yang ada diubah terlebih dahulu. Dengan kata lain, upaya untuk membuka cabang baru sebenarnya cukup panjang. Ibnu berharap, usulan perubahan aturan yang dimaksud dapat disetujui Pemerintah tahun ini

agar realisasi pembukaan kantor cabang di daerah dapat terealisasi pada tahun depan.

“Insya Allah tahun ini (Perpres keluar), karena harus mengubah Perpres. Ini sudah proses, tapi tentu butuh waktu,” katanya.

Sebab, lanjut dia, aturan tersebut tak hanya butuh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melainkan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta kementerian terkait.

Ibnu menjelaskan, usulan anggaran BPH Migas selama ini dilakukan melalui Kementerian ESDM yang nantinya dibahas dengan DPR untuk disetujui dalam APBN.

“Nantinya berapa yang disetujui, tahun lalu Rp160 miliar. Itu kecil dari PNPB kita dapat tahun 2018 yakni Rp1,35 triliun melebihi target,” ujarnya.

Lebih intens

Selama ini, kata Ibnu, Kantor BPH Migas hanya ada satu di Jakarta. Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPH Migas hanya dalam bentuk uji petik di daerah. Barulah, proses penyidikan di lapangan bisa dilakukan BPH Migas dengan mengirim petugas ke sana.

“Kami uji petik, misalnya ada laporan dari masyarakat atau kita baca di media. Kami kirim tim pengawasan di sana. Kan kita punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri sipil), kita kirim ke sana,” katanya

Dengan pembukaan kantor cabang di daerah, BPH Migas berkomitmen untuk bisa lebih intens melakukan pengawasan di daerah. Khususnya, penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan agar bisa lebih tepat sasaran. Sebab, kata dia, penyelewengan BBM bersubsidi memang kerap terjadi di daerah.

“Pasalnya masih ada penyelewengan BBM bersubsidi yang terjadi di daerah. Kalau dari volume pastinya kan kami mengacu kepada yang sudah dibawa ke pengadilan. Waktu itu pak kepala BPH Migas sudah menulis dengan Polri sekian uang negara yang sudah diselamatkan, makanya diperketat,” terang Ibnu.



Ibnu mengatakan, keberadaan kantong cabang di daerah ini harapannya bisa menekan praktik penyelewengan BBM. Apalagi, sudah ada beberapa kasus mengenai penyelewengan BBM seperti Solar subsidi di daerah yang kini sudah ditangani pihak Kepolisian.

“Pengawasan akan lebih intens, tahun ini kami sedang mengajukan kantor cabang di daerah, untuk mempermudah pengawasan,” kata dia.

Sebelumnya, BPH Migas telah melakukan upaya untuk mengawasi praktik penyelewengan BBM. Salah satunya dengan memperpanjang kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun lalu. Tujuannya untuk mengawal aktivitas di sektor hilir migas. Kerja sama ini berlaku hingga 2023.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pernah mengatakan perpanjangan kerja sama itu dilakukan karena sudah terasa manfaatnya. Sejak kerja sama diteken 2013 hingga Agustus 2018, ada sejumlah uang negara yang berhasil diselamatkan.

Selama periode itu, 3.051 kasus penyimpangan di sektor hilir berhasil ditangani aparat penegak hukum. Dari 3.051 kasus itu, terdapat barang bukti dengan total 16.747 kilo liter (kl) BBM yang diselewengkan oknum.

Dari penindakan itu ada uang negara berhasil diselamatkan sekitar Rp144,93 miliar. “Itu estimasi pengamanan uang negara,” kata Fanshurullah di lain kesempatan. ★

Kerja Keras Penuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Bencana

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Henry Ahmad mengatakan, Posko Nasional Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja keras memenuhi kebutuhan BBM, LPG, dan listrik untuk masyarakat karena terjadi musibah gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Hal itu, dia sampaikan saat menyampaikan kinerja Posko Nasional ESDM menghadapi Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Dia mengatakan posko tersebut memonitor kelancaran dan pendistribusian BBM, LPG, kelistrikan, dan geologi.

"Tahun ini kami agak banyak sedikit terjadi dinamika, karena adanya musibah gempa dan tsunami. Jadi ini juga kemarin kita cukup kelabakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk BBM, LPG, dan listrik," kata Henry di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1).

Tidak ada keterlambatan

Dia mengatakan secara umum pendistribusian BBM dan LPG lancar ada. Namun dia juga mengakui, bahwa pendistribusian ada yang terlambat, khususnya BBM jenis premium.

"Kalau ada masalah, tidak langka, tapi ada keterlambatan pengiriman khususnya premium," kata Henry.

Posko Nasional ESDM Hari Raya Natal 2018 dan Tahun 2019 ini berlangsung selama 22 hari, yaitu sejak tanggal 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.

"Kondisi ketersediaan stok BBM selama masa posko nasional ESDM adalah normal, tidak terjadi kelangkaan BBM selama masa posko tersebut diberlakukan," kata Henry.

Pada subsektor migas, tercatat penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG secara nasional hingga Minggu (6/1) tetap terkendali. Stok BBM, BBG, Jargas dan LPG dalam keadaan cukup dan penyaluran berjalan lancar. Ketersediaan BBM dan LPG adalah sebagai berikut: Premium: 21 hari; Solar: 24 hari; Peralite: 21 hari; Kerosene: 73 hari; Pertamina/Akra 92: 21 hari; Pertamina Turbo: 77 hari; Pertamina Dex: 30 hari; LPG: 18 hari dan Avtur: 31 hari.

Untuk pendistribusian jenis BBM gasoline mengalami kenaikan dibandingkan hari normal, seperti premium (12%), Pertamina/Akra 92 (29%), Peralite (4%) dan Pertamina Turbo (1%). Sebaliknya, penurunan konsumsi terjadi pada jenis BBM gasoil, yaitu Minyak

Solar/Akrasol (9%), Pertamina Dex (9%) dan Dexlite (31%).

Menurut Henry, LPG selama posko terjamin ketersediannya. Memang, kata dia, terjadi penurunan penyaluran LPG rumah tangga dari data penjualan normal. Namun, penyaluran tidak mengurangi kebutuhan masyarakat.

"Artinya masyarakat terpenuhi kebutuhannya, tapi realisasi penyalurannya lebih rendah dari target yang kami buat, yaitu sebesar 3,2%. Stok banyak tapi penyaluran 3,2%, yang disalurkan di bawah itu," ujar Henry.

Kondisi kelistrikan Nasional, beban puncak siang di tanggal 6 Januari 2019 sebagian besar dalam kondisi normal, kecuali Sistem Kelistrikan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Secara keseluruhan total pasokan nasional sebesar 32.516,04 MW dengan beban puncak sebesar 27.174,26 MW sehingga cadangan daya nasional sebesar 5.341,78 MW.

Terkait potensi bencana geologi, monitoring dilakukan secara terus menerus terhadap Gunung Sinabung dengan tingkat aktivitas level IV (Awat) dengan 1 kali gempa tornillo. Sementara, pantauan terakhir Gunung Anak Krakatau dengan tingkat aktivitas SIAGA dengan VONA warna ORANGE. Untuk





kegempaan dan gerakan, posko nasional ESDM merekam tidak ada kejadian sama sekali sepanjang pukul 14:00 WIB hingga 19.00 WIB pada hari Minggu (6/1).

Larangan membeli BBM pakai jerigen

Terkait bencana gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa telah melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memantau dan memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM di Palu dan Donggala.

Koordinasi pendistribusian BBM dengan PT Pertamina (Persero) maupun PT AKR Corp. Tbk dan badan usaha lainnya dilakukan untuk mempercepat proses revitalisasi infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat Palu, Donggala dan sekitarnya yang terkena dampak bencana.

Terhitung Senin 8 Oktober 2018, BPH Migas meminta masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jerigen.

“Pembelian dan pengisian BBM melalui jerigen memiliki risiko tinggi. BPH Migas meminta masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jerigen,” kata Fanshurullah.

Ada empat alasan BPH Migas melarang masyarakat membeli BBM atau bensin dengan jerigen. Pertama, bensin yang dijual di SPBU untuk masyarakat pengguna roda dua, roda empat, dan kendaraan plat kuning atau kendaraan umum.

Kedua, bensin sangat mudah terbakar sehingga

dapat menimbulkan kebakaran apabila masyarakat membeli dengan jerigen. Selanjutnya yaitu bensin yang dijual di SPBU tidak dapat diperjualbelikan kembali atau hanya untuk konsumen akhir.

Terakhir yaitu larangan pembelian bensin dengan jerigen ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penjualan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Sebelumnya, gempa magnitudo 7,4 yang menerjang Kota Palu dan sekitarnya menyebabkan sejumlah fasilitas publik hancur, termasuk SPBU. Akibatnya pendistribusian bensin di lokasi bencana terhambat. BPH Migas menemukan banyaknya antrean masyarakat di beberapa SPBU yang beroperasi untuk mengisi bensin menggunakan jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.

Kendati demikian, Fanshurullah menambahkan, sejumlah SPBU saat ini sudah mulai beroperasi pasca gempa Palu. Di antaranya sebanyak 15 dari 17 SPBU di Kota Palu, 3 dari 4 di Kabupaten Donggala, dan 1 dari 2 SPBU di Sigi. Pertamina pun menyiapkan 41 dispenser portable untuk menyuplai kebutuhan bensin di sana.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang karena stok bensin yang ada dipastikan aman,” ujarnya. ★





Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi Capaian Kinerja Kementerian ESDM dan BPH Migas di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sabtu (29/12/2018). Kegiatan ini juga dalam rangka BPH Goes to Campus di penghujung tahun 2018

BPH Migas Goes to Campus Unsri

Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut antara lain Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa dan Komite BPH Migas Ahmad Rizal. Selain itu hadir juga sebagai pembicara yaitu, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Aries Syafrizal, Dekan Fakultas Teknik Unsri

Subriyer Nasir, dan Sales Executive Retail Pertamina MOR II Sumbagsel Sindhu.

Pada kesempatan itu, Fanshrullah Asa mengungkapkan ini adalah kegiatan *Goes to Campus* pertama sebagai bentuk kepedulian dalam dunia pendidikan. Melalui

kegiatan ini, pihaknya berharap mahasiswa Unsri bisa berkiprah di BPH Migas dan mengubah pola pikirnya menjadi wirausaha di bidang Migas sehingga setelah lulus mampu membuka lapangan kerja baru. ★



Penyaluran BBM Satu Harga Lampau Target

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengatakan, sejak 2016 hingga akhir 2018, penyalur Bahan Bakar Minyak satu harga sudah tersebar di 131 lokasi. Jumlah tersebut melampaui target mereka tahun ini sebanyak 130 lokasi.

"Sebanyak 131 lokasi kita bangun khususnya di kecamatan 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Terakhir kita bangun di Maluku Barat," ujar Ifan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Target selama 2018 sebesar 73 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga terlampaui karena hingga kini sudah terbangun 74 SPBU kompak dan mini.

Dari 131 titik secara keseluruhan, perinciannya adalah 29 titik di Sumatera, 33 titik di Kalimantan, 14 titik di Sulawesi, 3 titik Jawa- madura, 1 titik di Bali, 14 titik di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 11 titik di Maluku, dan 26 titik di Papua dan Papua Barat.

Jika dirinci lebih lanjut, PT Pertamina (Persero) menyelesaikan 122 titik, dan PT AKR Corporindo Tbk sembilan titik. Adapun, target tahun depan akan ada 29 titik penyalur BBM satu harga, sembilan titik di Kalimantan, enam titik di Nusa Tenggara Barat, sembilan titik di Nusa Tenggara Timur, dan lima titik di Maluku dan Maluku Utara.



Total volume yang sudah disalurkan sejak tahun 2017-2018 sebesar 109.422 kilo liter (KL) dengan nilai Rp653,06 miliar. Angka itu terdiri dari 40.547 KL volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dengan nilai Rp208,81 miliar, dan 68.875 KL volume Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dengan nilai Rp 444,24 miliar.

Meski sudah ditetapkan, Fanshurullah mengatakan, pihaknya akan menerima usulan penambahan titik penyaluran

BBM satu harga untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kalau pemerintah daerah ada usulan BBM satu harga bisa kita evaluasi," kata Fanshurullah.

Fansurullah menambahkan, program ini dapat menjangkau sebanyak 421.955 keluarga. Artinya BBM Satu Harga dapat dinikmati kurang lebih 2 juta warga Indonesia di wilayah 3T. ★



BBM Satu Harga Hadir di Maluku Tenggara Barat

Kepala BPH Migas M. Fansurullah Asa turut meresmikan Program BBM satu harga pada SPBU Kompak di Desa Batu Putih, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kamis (27/12). Peresmian Program BBM di Desa Batu Putih ini diharapkan menjadi kado natal terindah bagi Pemerintah Kabupaten MTB dan seluruh masyarakat MTB



Dalam sambutannya, Fansurullah menyampaikan, penerapan BBM satu harga merupakan perwujudan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam sila ke 5 Pancasila.

"Adalah merupakan tanggung jawab BPH Migas guna mewujudkan amalan sila ke 5 ini kepada masyarakat. Dan salah satu upaya BPH Migas mewujudkan hal tersebut. Adalah dengan program BBM satu harga," ujar Fansurullah.

Ditambahkannya, dengan penerapan BBM satu harga di kabupaten MTB, maka

masyarakat MTB dapat memperoleh BBM khususnya untuk jenis premium dan solar, dengan harga yang sama yang berlaku di seluruh tanah air.

"Program BBM satu harga ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan merupakan kado natal bagi MTB. Oleh karena itu, kami mengharapkan peran pemerintah kabupaten dan seluruh jajarannya. Guna melakukan pengawasan terhadap proyek ini," tegasnya. ★

Kunjungan Kepala BPH Migas ke Lokasi Terdampak Bencana Banten

Kunjungan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa ke Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Pasauran, Cinangka, Serang, Banten, Senin (24/12/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Fanshurullah Asa diterima oleh Kasubdit Pengamat Gunung Api Wilayah Barat PVMBG, Badan Geologi Kristianto. Pada hari yang sama, Fanshurullah juga mengunjungi SPBU 3442213 Sukanegara, Carita, Pandeglang, Banten. SPBU yang sempat terkena dampak

tsunami ini sudah beroperasi normal 24 Jam. Masih di hari yang sama, kepala BPH Migas melakukan kunjungan ke PLN Rayon Anyer dalam rangka Monitoring penyediaan dan Distribusi BBM menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 serta Pasca Tsunami di Banten. ★



Kepala BPH Migas Kunjungi TBBM Tanjung Gerem

Setelah mengunjungi TBBM Tanjung Gerem, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa didampingi GM MOR III PT.Pertamina (Persero) Joko Pitoyo melakukan kunjungan ke Depot LPG Tanjung Sekong, Jl. Yos Sudarso,Pulo Merak,Cilegon Banten, Senin (24/12/2018).

Dari hasil kunjungan tersebut, diketahui:

1. Depot Tanjung Sekong melayani distribusi LPG untuk Wilayah Banten,Tangerang, dan Sebagian wilayah Jawa Barat, Sukabumi dan Bogor.
2. Memiliki fasilitas penimbunan dgn kapasitas tanki @2.500 MT.saat ini sedang dibangun fasilitas penyimpanan dengan kapasitas 2 x 44.000 MT dgn investasi Rp2,3 Triliun diperkirakan selesai bulan Juni 2019.
3. *Throughput* rata2 1.500-1.700 MT/ hari.Prediksi kenaikan selama Nataru sebesar 5-10%.
4. Didistribusikan dengan *skid tank* ke 65 SPBE diwilayah Banten,Tangerang, Sebagian Jawa Barat,Bogor dan Sukabumi.



5. Dampak dari tsunami di Banten pada Sabtu, 22 Desember 2018, kapal yang sedang bongkar LPG, tali penambat putus sehingga kapal untuk alasan safety dilabuhkan kembali kelaut. Bongkar LPG dari kapal ke tangki penyimpanan dengan melalui MLA (*Marine Loading Arm*) mengalami sedikit kerusakan dan sedang diperbaiki membutuhkan waktu 2 minggu. Sebagai alternatif saat ini untuk bongkar menggunakan alat *flexibel hose*. ★

Kepala BPH Migas Kunjungi SPBU Mini Milik Exxonmobil

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Tim BPH Migas melakukan kunjungan ke SPBU mini milik Exxonmobil di Desa Ciwareng, Kecamatan Bungur Sari dan Desa Cipta Karya, Kecamatan Cikopo, Purwakarta, Jumat (21/12/2018).

Kunjungan ini dalam rangka Monitoring Natal dan Tahun Baru (Nataru). SPBU mini tersebut menjual jenis BBM Ron 92 dengan nama Mobil 92 R. Kemudian, rombongan melanjutkan kunjungan di SPBU 3341201 Rest Area Cipali KM 102 untuk memastikan stok BBM aman menyambut Natal dan Tahun Baru, khususnya di Tol Cipali. ★





Pada cuti bersama, Senin (24/12/2018), Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan melakukan pengawasan lapangan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM sehari sebelum hari raya Natal 2018 di Surabaya, Jawa Timur.

Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian BBM Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Pengawasan lapangan ini sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Posko Nasional Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Rombongan meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Surabaya Group, Lokasi longsor Jalan Gubeng Raya, dan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur untuk memastikan ketersediaan stok BBM dan tersedianya listrik agar dapat melayani kebutuhan masyarakat Surabaya sehingga dapat menjalankan ibadah dan menikmati liburan dengan nyaman dan penuh suka cita.

Berikut hasil pengawasan lapangan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM Natal 2018 di Surabaya:

- **TBBM Surabaya Group**
Kapasitas Tangki Timbun TBBM (dalam KL):
Premium **47.000**
Solar **33.163**
Pertamax Turbo **5.001**
Pertamax **44.899**
Pertadex **4.877**

Coverage days masing-masing jenis BBM:

- Premium: 23,1 hari
- Pertamax: 18 hari
- Pertamax Turbo: 23,4 hari
- Solar: 9,3 hari
- Pertadex: 151,8 hari

Berikut potensi kenaikan atau penurunan konsumsi menjelang satgas natal:

- Premium: 9%

- Peralite: 7%
- Pertamina: 2%
- Pertamina Turbo: -1%
- Solar/Bio: -2%
- Pertadex: 3%
- Dextrite: 3%
- Kerosene: 6%

Layanan tambahan Kiosk Pertamina di sepanjang ruas Tol Surabaya:

- KM 575 Tol Ngawi – Sragen
- KM 597 Tol Wilangan – Ngawi
- KM 626 Tol Wilangan – Ngawi
- KM 678 Tol Mojokerto – Kertosono
- KM 695 Tol Mojokerto – Kertosono
- KM 725 Tol Surabaya - Mojokerto

★



FGD dengan Tema ‘Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan’

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Bakrie & Brothers menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan’ di Hotel Senjiur Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (19/12/2018).

Kegiatan yang dibuka Gubernur Kaltim, Isran Noor, ini dihadiri Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Dirut PT Bakrie & Brothers Bobby Gafur Umar, serta para perwakilan provinsi di Kalimantan.

Dalam kesempatan itu, Fanshurullah mengatakan bahwa suplai gas dari Kalimantan

saat ini seharusnya dioptimalkan untuk kebutuhan dalam negeri. Selama ini, kata Fanshurullah saat berbicara dalam



sebuah forum FGD di Kaltim, cadangan gas sebagian besar diekspor dalam bentuk gas alam cair atau LNG.

Fanshurullah menambahkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun infrastruktur gas di Kalimantan. Secara khusus ia menyebut pentingnya membangun jaringan pipa transmisi gas yang membentang dari sumber gas di Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan,

Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Tengah.

“Banyak komponen masyarakat yang pasti akan merasakan manfaatnya, kalau jaringan gas tersebut terwujud. Industri sudah pasti butuh gas, pembangkit listrik juga perlu gas, jaringan gas rumah tangga juga. Pokoknya, pasti bermanfaat. Tidak itu saja, pertumbuhan ekonomi juga akan lebih cepat,” katanya. ★



Kunjungan Kepala BPH Migas ke TBBM Samarinda

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengunjungi TBBM Samarinda PT Pertamina (Persero), Kamis (20/12/2018).

Dalam kunjungan ini, Kepala BPH Migas didampingi oleh Kepala TBBM Samarinda Muhammad Asyari dan Sales Executive Retail PT Pertamina (Persero) wilayah Samarinda Vano Daniel Wibawanto.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pendistribusian dan ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Natal Tahun 2018. ★



Workshop “Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional” di Kepulauan Seribu

Pada hari ini Kamis (20/12/18) bertempat di Gedung Karang Taruna Pulau Panggang Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, BPH Migas mengadakan Workshop bertajuk “Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional”.



Kegiatan ini dihadiri oleh Pemda, perwakilan masyarakat, dan stakeholder terkait dengan susunan acara :

1. Sambutan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ivan Doly Gultom
2. Sambutan oleh Bupati Kepulauan Seribu diwakili oleh kasi Kesra Kelurahan Kepulauan Seribu Sopiah

Narasumber pada sesi panel diskusi sosialisasi antara lain :

1. Kasubdit Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan
2. Biro Hukum Kementerian ESDM Muhidin
3. SE Retail II PT Pertamina Persero MOR III Fachrizal Imaduddin. ★



Monitoring Pra Natal Batang-Semarang



Jumlah Awak Mobil Tangki (AMT):
153 unit

TBBM Semarang group menyalurkan BBM ke:

- Kab. Semarang
- Kota Semarang
- Kab. Demak
- Kab. Purwodadi
- Kab. Kudus
- Kab. Pati
- Kab. Jepara
- Kab. Batang
- Sebagian pekalongan

Fokus utama dari kegiatan monitoring ini pula adalah :

1. Memastikan kesiagaan avtur di Labuan Bajo
2. Tol trans jawa; titik utama di MOR IV sebagai penyangga karena titik bertemunya arus lalu lintas dari wilayah barat dan timur Jawa.
3. Rencana kunjungan RI 1 di jalur tol Surabaya - Semarang.
4. Memastikan penggunaan JBT tidak disalahgunakan karena merupakan BBM subsidi ★

Tim BPH Migas melaksanakan monitoring pra natal Batang-Semarang, Rabu (19/12/2018) dalam rangka persiapan kunjungan bapak menteri ESDM dan Presiden RI di tol Semarang-Batang, adapun hasil monitoringnya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi lapangan di jalan keluar tol pemalang terdapat 3 gerbang pembayaran keluar tol.
2. Kondisi Jembatan kali kutho besok siap utk diresmikan oleh Presiden RI. Saat ini sedang persiapan pemasangan tenda dan acara. Setelah peresmian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di Rest Area Km. 391A Ruas Tol Semarang-Batang.
3. Di sepanjang Jalur Tol Semarang-Batang untuk mengatasi kebutuhan BBM Pemudik Natal dan Liburan Tahun Baru. Pertamina menyiapkan KIOSK BBM di KM 389B dan REST Area Km 391A melalui penyediaan mobile dispenser (PTO) dengan Kapasitas pertamax 16 KL dan Pertamina dex 16 KL. Pertamina juga menyediakan cadangan *mobile* tangki Pertamax dan Pertamina Dex masing-masing 16 KL.

Adapun untuk jumlah BBM kemasan ukuran 10L sbb:

- Pertamax 25 Kaleng
- PertaDex 24 Kaleng

Penyimpanan drum ukuran 200 liter sbb:

- Pertamax 22 drum
- PertaDex 8 drum

4. Hasil monitoring

- * SPBU 44.513.23*
- Alamat: Jl. Utama Barat 337
- Perbatasan Batang-Kendal

- Penyaluran Premium : 2.5 Kl/hari
- Biosolar : rata2 7 kl/hari
- Peralite : rata2 10-11 kl/hari
- Pertamax : rata2 2.5 Kl/hari
- Pertamina Dex : rata2 100 l/hari

Penyaluran saat ini belum mengalami kenaikan secara signifikan. Diperkirakan kenaikan penyaluran BBM menjelang libur dan mudik natal tahun baru +/- rata2 8KL per bulan utk Premium, Biosolar, Peralite dan Pertamax

Antisipasi akan melakukan penambahan DO dari TBBM Pengaporn di Semarang

Informasi : Penyediaan dan distribusi bbm aman dan lancar. Konsumsi terbesar yaitu pertalite. Kenaikan konsumsi terjadi di tiap *weekend*.

5. Hasil monitoring d TBBM Semarang Group:
Coverage days masing-masing jenis BBM
 - Premium: 8.6 hari
 - Peralite: 3.3 hari
 - Pertamax: 8.4 hari
 - P. Turbo: 121 hari
 - Solar: 2.6 hari
 - Pertadex: 17.3 hari

Adapun untuk potensi kenaikan menjelang satgas natal:

- Premium: 3.51%
- Peralite: 5.13%
- Pertamax: 4.39%
- P. Turbo: 4.60%
- Solar: 3.72%
- Pertadex: 4.60%





Peresmian Program BBM Satu Harga ke-109

Komite BPH Migas M Ibnu Fajar turut meresmikan Program BBM Satu Harga ke-109 SPBU Kompak 56.843.16 di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (17/12/2018). SPBU Seluas ini menjual dua produk

BBM, yaitu Solar harga Rp5.150,- dan Premium harga Rp6.450,- dengan storage tank sebesar 2 x 20 kl. Suplai BBM SPBU ini didapat dari TBBM Labuhan Badas yang berjarak sekitar 120 km. Harga BBM Premium di eceran sebelum

terbangunnya SPBU ini berkisar Rp9.000,-. Diharapkan dengan terbangunnya SPBU ini, keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian. ★

Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional di Cianjur



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional di Cianjur, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto, Komite BPH Migas Jugi Prajugio, dan Bupati Cianjur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan Imam Haris. Perwakilan PT Pertamina (Persero) MOR III Hardiyanto Tato juga terlihat hadir di lokasi acara. ★



Sosialisasi “Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa” di Surabaya



Kamis (13/12/2018), bertempat di Hotel Wyndham Surabaya, Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio membuka acara Sosialisasi “Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa”. Acara sosialisasi dipandu oleh Moderator Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Supoyo.

Selain Jugi, narasumber dalam acara ini antara lain Kombes Pol Umardani, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Kukuh Sudjatmoko, dan Henry Gunawan, Assistant VP Asset Management PT PGN. Tbk. ★

Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT

Sehubungan dengan akan ditetapkannya alokasi volume Jenis BBM Tertentu Tahun 2019 untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT), Kamis (13/12/2018), BPH Migas menyelenggarakan Pertemuan dalam rangka Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT (Minyak Solar) untuk Konsumen Pengguna Transportasi Laut dan Kereta Api bertempat di Ininside Hotel Yogyakarta.



Kegiatan ini dibuka oleh Komite BPH Migas M. Lobo Balia dengan dihadiri oleh para perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT (Minyak Solar) untuk Konsumen Pengguna Transportasi Laut dan Kereta Api dipimpin oleh Komite BPH Migas Henry Ahmad dan dimoderatori oleh Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak. ★



BPH Migas Tak Jadi Dihapus



Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 lalu. Revisi Undang Undang (RUU) Migas untuk menggantikan UU No. 22/2001 baru saja disetujui untuk dibahas bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pekan lalu.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya bersyukur karena dalam RUU Migas versi terbaru itu BPH Migas tetap ada.

Sebelumnya, sempat muncul draft RUU Migas yang meleburkan BPH Migas dengan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, sehingga tak ada lagi BPH Migas.

"Alhamdulillah sudah sampai di Paripurna dan sudah ada keputusannya di Baleg (Badan Legislasi) RI dan Komisi VII DPR RI. Kami optimis sudah sesuai dengan aspirasi baik di Komisi VII maupun Baleg, tinggal tunggu masukan ke pemerintah," katanya saat ditemui di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (11/12/2018). ★

Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Hari Raya Natal 2018 di Ngawi, Madiun dan Kertosono, Jawa Timur



Polri Dukung BPH Migas Awasi Penyaluran BBM

Dalam rangka sinergisitas, optimalisasi dan implementasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, pada hari ini Kamis (6/12/18) bertempat di Vega Hotel Sorong Papua Barat, BPH Migas mengadakan Workshop bertajuk “Sinergisitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendiatribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional”.



Surabaya (19/12/2018) TIM Pengawasan lapangan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM sebelum hari raya Natal 2018 di Ngawi, Madiun dan Kertosono, Jawa Timur. Kios yg TIM datangi diantaranya ; 1. Kios K Pertamax di jalan tol KM 6958, Kab,Jombang. - Mulai beroperasi tanggal 20 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019, beroperasi selama 24 jam. - Menjual BBM jenis Pertamax dan Pertamina Dex. - Sarfar tersedia 1 engkol Pertamax, 1engkol Pertamina Dex, 7 drum (kapasitas 200 liter) Pertamax dan 3 drum (kapasitas 200 liter) Pertamina Dex. - CP Kios K : Malik (No Hp 085 6085 71118). 2. SPBU 54 644 12 dan SPBU 54 644 05, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk ; - Beroperasi selama 24 jam. - Belum terjadi lonjakan konsumsi yang signifikan sampai dengan H6 hari Natal 2018. - Tidak terjadi kendala dalam penyediaan dan pendistribusian BBM selama masa Natal dan Tahun Baru pada tahun sebelumnya. - Stok BBM dalam kondisi aman. - Langkah antisipasi dengan menjaga stok BBM di SPBU agar dapat mencukupi kebutuhan konsumsi BBM. ★

Acara dihadiri oleh Anggota Polsek, Polres dan Polda Sorong dan Hiswana Migas serta Badan Intelijen Daerah (Babinda) Propinsi Papua Barat. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Sumihar Pandjaitan yang juga bertindak sebagai salah satu narasumber.

Dikatakan oleh Anggota Komite BPH Migas Sumihar Pandjaitan, dalam rangka optimalisasi dan implementasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengawasan bersama, pengawasan bersama

ini dilakukan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI untuk menunjang pembangunan nasional dan mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk sebagai pedoman dalam pengawan bersama dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa, Sehingga sinergitas antara BPH Migas dan Polri dapat terwujud.★

Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa di Bandung

Selasa (11/12/2018), BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa di Hotel El Royale Bandung, Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang dipilih untuk pelaksanaan sosialisasi karena terdapat kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Gas Bumi melalui pipa serta jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Sosialisasi ini dalam rangka tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Jugi Prajugio. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Komite BPH Migas Hari Pratoyo. Selanjutnya dalam rangka implementasi MoU akan ditindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa di lapangan secara berkelanjutan. ★



Mendapat Kunjungan Anggota DPR dan Pemda Bengkulu

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyambut secara langsung rombongan yang dipimpin oleh Anggota DPR RI ibu Dewi Coryati, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Kepala Bagian Ekonomi Provinsi Bengkulu, serta Kepala Subbagian Perdagangan Provinsi Bengkulu, Rabu (5/12/2018).

Kunjungan yang bertempat di Gedung BPH Migas Jakarta ini dalam rangka koordinasi penambahan kuota JBT dan JBKP di Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2018 dan 2019 dan berkonsultasi mengenai pendistribusian dan jaminan ketersediaan Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium di Provinsi Bengkulu.★



Audiensi di Kalimantan Timur

Kamis (30/11/2018), Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Komite BPH Migas Jugi Prajugio dan Tim Direktorat Gas Bumi didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Ikhwan Datu Adam melakukan audiensi

bersama Direksi PT Bakrie Brothers dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka mendorong implementasi pembangunan pipa gas trans Kalimantan. ★



Sinergitas Instansi dalam rangka Pengamanan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Bangka

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan workshop dan sosialisasi dengan tema Sinergitas Instansi dalam rangka Pengamanan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional, Hotel Novotel Bangka, Kamis, (29/11/2018)

dan Hiswana Migas. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar yang juga bertindak sebagai narasumber. Para narasumber lainnya di antaranya Kombes Polisi Joseph Wisnu Sandjaya, Inspektur IV Itjen Kementerian ESDM Yose Rizal, dan Kasie Pengawasan Kemetrolgian Direktorat Metrologi Syarif Hidayat.

Ditemui saat acara, Ibnu Fajar menyampaikan, "Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini mendorong kita agar saling memberi informasi, saling bantu dalam pengawasan maupun pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat, serta dalam melakukan penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas SDM".

Workshop ini dalam rangka tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Acara dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI Eko Wijaya Parsito, Anggota Polsek, Polres dan Polda Kepulauan Bangka Belitung



Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT untuk Konsumen Pengguna Transportasi Laut dan Kereta Api



BPH Migas menyelenggarakan pertemuan dalam rangka Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT (Minyak Solar) untuk Konsumen Pengguna Transportasi Laut dan Kereta Api bertempat di Inside Hotel Yogyakarta, Kamis (13/12/2018).



Kegiatan ini sehubungan dengan akan ditetapkannya alokasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2019 untuk masing-masing konsumen pengguna.

Kegiatan ini dibuka oleh Komite BPH Migas M. Lobo Balia dengan dihadiri oleh para perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal



Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan perwakilan sejumlah Badan Usaha.

Pembahasan Mekanisme Pengusulan Kebutuhan JBT untuk Konsumen Pengguna Transportasi Laut dan Kereta Api dipimpin oleh Komite BPH Migas Henry Ahmad dan dimoderatori oleh Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak.



Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Komite BPH Migas Jugi Prajugio serta rombongan dari Direktorat Gas Bumi BPH Migas bersama Anggota Komisi VII DPR RI Ikhwan Datu Adam melakukan kunjungan kerja ke PT Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/11/2018).

Kunjungan kerja ini dalam rangka pemetaan dan pemanfaatan *Liquefied Natural Gas* (LNG).

Kunjungan kerja ini juga diisi dengan audiensi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, meninjau lokasi pemanfaatan LNG di *warehouse* PT Trakindo, Gas Facility Transfer PT Pertagas, dan Rumah Sakit PT Pertamina Balikpapan.



Sinergi Mengoptimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi Konsumen Pengguna BBM



BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjalin kesepakatan dalam rangka efisiensi pertukaran data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM. Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung Kamis (6/12/2018) di Hotel Santika Bengkulu.

Tujuan Kesepakatan Bersama (MoU) ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM dalam rangka meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perencanaan penentuan alokasi kuota volume jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, serta meningkatkan penerimaan iuran Badan Usaha dari jenis BBM Umum.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa yang turut menandatangani MoU tersebut mengatakan, "Berdasarkan data penyediaan dan pendistribusian BBM Provinsi Bengkulu yang diolah oleh Direktorat BBM, BPH Migas, saat ini terdapat 1 (satu) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan & Pemilik Terminal BBM di Bengkulu dengan jumlah tangki 15 dan Kapasitas 20.263,86 Kiloliter. Sedangkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM di Bengkulu semula di tahun 2017 berjumlah 23 Badan Usaha, di tahun 2018 menjadi sebanyak 19 Badan Usaha.



Selain itu, terdapat 54 titik Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 51 SPBU, 1 SPDN, 1 AMT dan 1 APMS. Di sisi lain, realisasi JBT dan JBKP terhadap kuota BBM relative aman atau tidak mengalami over kuota. Namun demikian tentu perlu kerjasama seluruh pihak agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat berjalan dengan baik".

MoU ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas. ★

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Bogor



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851K/15/MEM/2018 di Hotel Pendopo 45 Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menginformasikan terkait kebijakan pemberlakuan BBM JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Turut hadir dan menjadi narasumber pada kesempatan ini antara lain Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono dan Sumihar Panjaitan, Anggota Komisi VII DPR RI KH. Nawafie Saleh, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufon Asrofi, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Ervan.

Acara serupa juga digelar di Balai Pertemuan Umum, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selasa (6/11/2018) yang dihadiri oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono dan Jugi Prajogio serta beberapa narasumber lainnya. ★



Undang Stakeholder Jargas, BPH Migas Selenggarakan *Sharing Knowledge*

BPH Migas menyelenggarakan *Sharing Knowledge* terkait Potensi Pengembangan Market untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dalam rangka Mewujudkan Nilai Keekonomian Wajar dalam Pengelolaan Jaringan Gas yang Berkelanjutan di Royal Hotel Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/11/2018). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPH Migas dalam penetapan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.



Kegiatan ini dihadiri oleh Komite BPH Migas Jugi Prajogio dan Hari Pratoyo yang diisi oleh beberapa narasumber, yakni Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengadaan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Sekaryawan, VP Commercial Non Java & City Gas PT Pertagas Niaga Arief Wardono, Sales Manager Area Palembang PT PGN (Tbk), Ahmad Cahyad, dan perwakilan Perusahaan Daerah Kota Tarakan, PT Bontang Migas dan Energi, dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J). ★

Arahan Menteri ESDM



Menteri ESDM Ignasius Jonan memberi pengarahannya kepada Komite BPH Migas dan Pejabat Eselon I,II,III,dan IV Ditjen Migas dan BPH Migas, Sabtu (17/11/2018). Arahan utama Ignasius Jonan kepada Pejabat Ditjen Migas dan BPH Migas adalah merencanakan hal yang sederhana, tapi mudah dilaksanakan dan memberi manfaat bagi rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Ignasius Jonan menyampaikan terima kasih atas keberhasilan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak akhir tahun 2016. Ignasius Jonan meminta kepada BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan BBM dengan bekerja sama dengan Polri.

Di bidang Gas Bumi, Jonan meminta Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak hanya terbatas pada jumlah/panjang pipa yang dibangun, tetapi juga jumlah rumah yang tersambung dengan jaringan gas. Jaringan Distribusi Gas tidak hanya untuk komersial/ industri tetapi juga untuk keperluan rumah tangga dan apabila memungkinkan di

tahun 2019 akan mengusulkan Perpres pembangunan sambungan gas untuk rumah tangga. Tujuannya adalah untuk penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan.



Achievment Motivation Training Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

Dalam acara tersebut, Ego menyampaikan bahwa Menteri ESDM mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 harga yang merupakan salah satu program strategis Nasional yang berhasil dan sukses. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemimpin harus

memberi contoh, sering turun kelapangan untuk memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan ASN harus lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan tugas mengikuti perkembangan jaman di era milenial ini yang semuanya serba digital. ★

BPH Migas mengadakan *Achievment Motivation Training* pada Selasa (6/11/2018). Dengan narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dan dihadiri M. Fanshurullah Asa, tujuan acara ini ialah meningkatkan motivasi pegawai.



Tim Gabungan Tindak Tegas SPBU Nakal

Anggota Komisi VII DPR RI Eko Wijaya bersama BPH Migas dan Bareskrim Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/11/2018). Sidak dilakukan terkait laporan dan keluhan masyarakat yang diterima BPH Migas, lantaran sulitnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi di Babel.





Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Magelang

Komite BPH Migas M.Lobo Balia membuka Sosialisasi Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 kepada Masyarakat Pengguna di Grand Artos Hotel Magelang, Jawa Tengah, Rabu (7/11/2018).

Para narasumber dalam acara ini antara lain M. Lobo Balia, Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Kadir Karding, Marketing Branch Manager DIY PT Pertamina, (Persero) Dody Prasetya, dan Kabag Perekonomian Setda Kab. Magelang Siti Zumaroh. ★

"BBM solar ini rawan penyelewengan, padahal ini untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin BBM bersubsidi ini tepat sarannya bukan malah diselewangkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Eko.

Selain melakukan sidak lanjut Eko, tim gabungan juga melakukan pengecekan atau terra mesin SPBU. Hal ini dilakukan supaya BBM yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibayar oleh masyarakat.

Sementara itu, anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar menyatakan bahwa sidak ini untuk memantau secara langsung kondisi di sentra-sentra pengisian BBM di

Babel. Khususnya BBM yang bersubsidi dari pemerintah.

"Kalau kita temukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tentunya kita dari BPH Migas akan menindaklanjutinya. Kebetulan di sini juga ada Komisi VII yang merupakan mitra kita," terangnya.

Kepada masyarakat dia juga menyampaikan bila melihat atau mendengar adanya penyalahgunaan BBM dapat melaporkan ke BPH Migas atau Komisi VII DPR RI atau juga pihak Pertamina.

Diakuinya laporan dari masyarakat yang masuk ke BPH Migas dari masyarakat

bermacam-macam. Ada disebutkan terjadi kelangkaan BBM di Babel, ada juga dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM.

"Dari data yang ada di kami sampai September kuota BBM yang sudah terealisasi 77%. Artinya sekitar 23% lagi itu masih cukup banyak dan ini harus kita lakukan pemantauan agar tidak diselewangkan," imbuh Ibnu. ★

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Malang

BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (13/10).



Hal ini diadakan guna menyosialisasikan tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM.

Turut hadir Komite BPH Migas Henry Ahmad dan M. Ibnu Fajar, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam, Inspektur V Kementerian ESDM Murdo Guntoro, Biro Hukum Kementerian ESDM Muhidin, dan narasumber-narasumber lainnya.

Masih di Jawa Timur, lima hari sebelumnya BPH Migas juga menggelar kegiatan serupa di Sidoarjo. Kali ini, anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal membuka rangkaian acara sosialisasi yang diisi oleh beberapa narasumber antara lain Anggota Komisi VII DPR RI Syaikul Islam, Anggota Komite BPH Migas Hari Pratoyo, dan Biro Hukum Kementerian ESDM Putri Fikdiani.

Dalam sambutannya, Ahmad mengatakan, "Kesempatan ini kami harapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi



dalam memberikan segala informasi terkait bagaimana pelaksanaan pendistribusian BBM dan sejauh apa ketersediaannya, khususnya adalah Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan menjadi input penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM". ★





BPH Migas-Pemerintah Provinsi Riau Bersinergi dalam Pemanfaatan Data Konsumsi Konsumen Pengguna BBM

BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat bersinergi dalam pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna BBM. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa turut menandatangani kesepakatan ini pada Rabu (17/10/2018) di Riau.

Sinergi ini dalam rangka efisiensi pertukaran data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM antara Pemerintah Provinsi Riau dan BPH Migas. Kesepakatan Bersama (MoU) ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kesepakatan Bersama (MoU) ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM dalam rangka meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), perencanaan penentuan alokasi kuota volume jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, serta meningkatkan penerimaan iuran Badan Usaha dari jenis BBM Umum.

Fanshurullah Asa dalam sambutannya mengatakan, "Berdasarkan data penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Riau, saat ini terdapat empat Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan BBM dengan jumlah tangki 63 dan kapasitas 154.000 Kilo Liter, sedangkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM yang berniaga di Riau yang semula 2017 sebanyak 25 BU tahun 2018 menjadi sebanyak 16 BU. Sedangkan

jumlah penyalur mulai dari APMS, SPBB, SPBU, SPBU Kompak, SPBU Mini, SPDN total sebanyak 208. Di sisi lain realisasi JBT dan JBKP terhadap kuota BBM relatif aman atau tidak mengalami over kuota. Namun demikian tentu perlu kerja sama seluruh pihak agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat berjalan dengan baik".

Objek pertukaran data yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi berdasarkan Kesepakatan Bersama meliputi data Badan Usaha Wajib Pungut yang melakukan pendistribusian di wilayah Provinsi Riau serta data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemprov Riau dan BPH Migas berlaku selama 12 bulan setelah disahkan. ★



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id